

# PERAN GERAKAN FILANTROPI UNTUK KEBERLANJUTAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL (OMS)

DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI  
email: otho@bappenas.go.id

## ABSTRAK

Kajian Peran Gerakan Filantropi untuk Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) ditujukan untuk melakukan pemetaan institusi, aktivitas, dan kekuatan filantropi yang diharapkan bisa didayagunakan untuk mendukung pengembangan demokrasi di Indonesia melalui dukungan terhadap program dan keberlanjutan OMS; mengidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan OMS dalam memobilisasi filantropi untuk keberlanjutan program dan organisasinya; dan menyusun usulan rekomendasi kebijakan bagi pengembangan filantropi dan OMS di Indonesia.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan fenomena sosial tentang peran gerakan filantropi dalam mendukung program dan keberlanjutan OMS. Kajian ini juga dilaksanakan melalui wawancara mendalam, FGD (Focussed Group Discussion), studi kepustakaan dan pengamatan lapangan.

Dari kajian ini didapatkan peta institusi, aktivitas, dan kekuatan filantropi yang bisa digerakkan untuk mendukung program dan keberlanjutan OMS, peran dan posisi gerakan filantropi dalam mempromosikan dan mengembangkan program demokrasi di Indonesia yang dijalankan oleh OMS, dan faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap OMS dalam memobilisasi gerakan filantropi untuk mendukung keberlanjutan program dan organisasinya.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, disampaikan beberapa rekomendasi yang dapat diajukan baik OMS, masyarakat, pemerintah, dan swasta, antara lain: perlunya OMS meningkatkan kapasitasnya dalam memperkuat citra diri, serta mengemas dan mempromosikan program-program penguatan demokrasi agar dapat didukung masyarakat, perlu upaya untuk mendidik masyarakat untuk menyumbang program-program non karitatif, diantaranya program-program penguatan demokrasi, perlu enabling environment dalam bentuk kebijakan yang mempermudah dan mengapresiasi inisiatif dan upaya memobilisasi dukungan filantropi untuk penguatan demokrasi, pihak swasta perlu membuka hubungan yang setara dengan OMS terutama untuk pendayagunaan sumber daya yang lebih bernilai strategis dan berdampak luas dibandingkan bantuan-bantuan yang sifatnya karitatif dan jangka pendek

## 1. LATAR BELAKANG

Sejak krisis multidimensional yang menghantam Indonesia pada tahun 1998, kehidupan menjadi lebih berat bagi sebagian besar rakyat. Gempa bumi, tsunami, bencana banjir, merebaknya penyakit menular, dan berbagai kecelakaan menjadikan perjalanan hidup jauh lebih berat. Belum lagi permasalahan kesehatan dan sosial yang belum tertanggulangi seperti anak jalanan, pekerja seks, penularan HIV/AIDS dan penduduk miskin yang menderita akibat berbagai penyakit, serta berbagai persoalan lainnya. Ditambah lagi

Krisis ekonomi, bencana alam berikutan beragam persoalan sosial yang menyertainya secara tidak langsung telah menjadi faktor pendorong bagi berkembangnya kegiatan filantropi (kedermawanan sosial) di Indonesia. Filantropi kemudian menjadi alternatif sumber daya dalam menggerakkan berbagai upaya untuk memberdayakan kembali masyarakat dan membantu mengatasi beragam persoalan sosial yang dihadapinya. Survei rumah tangga yang dilakukan PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) mengenai potensi dan perilaku menyumbang masyarakat di sepuluh kota di Indonesia pada tahun 2000, 2004 dan 2007. Hasil survei menunjukkan bahwa jumlah rata-rata sumbangan masyarakat untuk program-program yang sifatnya umum mengalami kenaikan dari Rp.301,515/orang/ tahun pada tahun 2004 menjadi Rp.325.775/orang/tahun pada tahun 2007.

Meningkatnya sumbangan masyarakat ini telah memberikan momentum bagi berkembangnya kegiatan penggalangan dan penyaluran dana sosial dan bentuk-bentuk dukungan lainnya dari masyarakat. Upaya penggalangan dukungan dan sumber daya juga mengalami perluasan. Masyarakat mulai memperluas cakupan penyaluran dukungannya pada program-program baru yang selama ini belum banyak mendapatkan dukungan. Mereka mulai mengalokasikan sumbangannya untuk program demokratisasi, seperti penegakan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia), pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pelestarian lingkungan dan program-program non charity lainnya.

Kegiatan kedermawanan semacam ini dikenal sebagai Sosial Justice Philanthropy atau Filantropi Keadilan Sosial (FKS). Kecenderungan baru dalam gerakan filantropi ini telah membuka kesadaran baru di kalangan organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia mengenai peran filantropi sebagai salah satu alternatif sumber daya bagi pembiayaan program dan keberlanjutan OMS. Pendanaan dan keberlanjutan OMS di Indonesia selama ini memang belum banyak memanfaatkan potensi filantropi lokal dan banyak menggantungkan sumber pendanaannya dari hibah lembaga donor internasional. Ketergantungan kepada bantuan dari badan-badan internasional tersebut, bagaimana pun juga, pada gilirannya akan menjadi masalah bagi keberlanjutan program-program LSM, terutama kalau bantuan tersebut berakhir.

## 2. PERMASALAHAN

Penelitian ini secara khusus mengkaji peran gerakan filantropi dalam mendukung keberlanjutan organisasi masyarakat sipil dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Secara umum, penelitian ini dititiktekan untuk menjawab pertanyaan utama penelitian (granteur question), yakni:

Bagaimana peran gerakan filantropi dalam menegakkan demokrasi di Indonesia melalui dukungan terhadap pendanaan program dan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil (OMS)? Pertanyaan utama penelitian itu selanjutnya diturunkan dalam beberapa pertanyaan khusus (sub-question) yang sifatnya lebih operasional, yaitu:

- Pertama,** bagaimana peta institusi, aktivitas, dan kekuatan filantropi yang bisa digerakkan untuk mendukung program dan keberlanjutan organisasi Masyarakat Sipil (OMS)?
- Kedua,** Bagaimana peran dan posisi gerakan filantropi dalam mempromosikan dan mengembangkan program demokrasi di Indonesia yang dijalankan oleh OMS? Program demokrasi dititiktekan pada tiga aspek, yakni Hak-hak politik (Political Rights), Kebebasan Sipil (Civil Liberty) dan penguatan institusi Demokrasi.
- Ketiga,** faktor-faktor apa saja, baik internal maupun eksternal, yang berpengaruh terhadap OMS dalam memobilisasi gerakan filantropi untuk mendukung keberlanjutan program dan organisasinya? Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan organisasi masyarakat sipil (OMS), sementara faktor eksternal terdiri atas peluang dan tantangan dari lingkungan luar OMS. Kekuatan dan peluang bisa menjadi pendukung OMS dalam menggerakkan filantropi dalam mendukung program demokrasi di Indonesia, sementara kelemahan dan tantangan bisa menjadi penghambatnya.
- Keempat,** upaya apa saja yang diperlukan agar gerakan filantropi di Indonesia bisa lebih berkembang dan optimal dalam mendukung program dan keberlanjutan OMS di masa mendatang? Pembahasan pertanyaan ini lebih banyak berkaitan dengan rekomendasi penelitian untuk mengembangkan filantropi dan OMS di masa mendatang. Rekomendasi ini disusun dengan mengacu pada hasil pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang dikaitkan dengan berbagai teori yang digunakan dalam penelitian.

## 3. TUJUAN

- a. Melakukan pemetaan institusi, aktivitas, dan kekuatan filantropi yang diharapkan bisa didayagunakan untuk mendukung pengembangan demokrasi di Indonesia melalui dukungan terhadap program dan keberlanjutan OMS;
- b. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan OMS dalam memobilisasi filantropi untuk keberlanjutan program dan organisasinya;
- c. Menyusun usulan rekomendasi kebijakan bagi pengembangan filantropi dan OMS di Indonesia

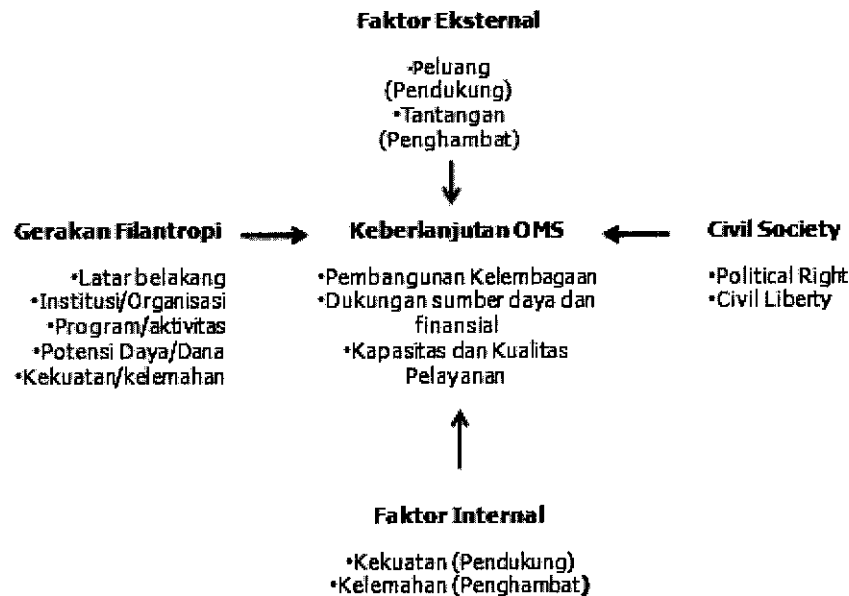
## 4. METODOLOGI

Penelitian ini termasuk pada kategori penelitian dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan fenomena sosial tentang peran gerakan filantropi dalam mendukung program dan keberlanjutan OMS, khususnya yang bergerak dalam isu atau program demokrasi (Creswell, 1994). Berdasarkan tujuannya, penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif (Neuman, 2003).

Informan penelitian adalah individu dan/ atau pengelola/ pegiat organisasi filantropi dan OMS dengan syarat-syarat memiliki kompetensi dan bertugas sehari-hari pada bidang yang berhubungan langsung dengan tujuan penelitian, serta memiliki posisi strategis dalam struktur kepengurusan organisasi filantropi maupun OMS. Mereka berasal dari kalangan pendiri, pengurus atau pelaksana harian organisasi filantropi maupun OMS yang menjadi subjek penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai bahan analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan empat cara, yakni wawancara mendalam, FGD (Focussed Group Discussion), studi kepustakaan dan pengamatan lapangan. Analisis penelitian ini dilakukan secara bersamaan pada saat pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan laporan.

## Model Analisis Peran Gerakan Filantropi untuk Keberlanjutan OMS



Gerakan filantropi berperan dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia melalui dukungan dana/daya yang diberikannya untuk membiayai program dan keberlanjutan OMS. Upaya OMS dalam mobilisasi filantropi untuk menjamin keberlanjutan program-program demokrasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor internal OMS berupa kekuatan dan kelemahan OMS, serta faktor-faktor eksternal OMS berupa peluang dan ancaman lingkungan di luar organisasi.

### I. HASIL KAJIAN

#### 1. Perkembangan Potensi dan Perkembangan Filantropi Indonesia

Filantropi (kedermawanan sosial) mungkin tergolong kata yang baru dan asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, praktek kedermawanan sendiri sudah dikenal dan menjadi bagian kehidupan masyarakat nusantara. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kegiatan filantropi sudah dipraktikkan sejak ratusan tahun yang lalu. Hal ini bisa diketahui dari ditemuinya praktek filantropi sebagian bagian dari tradisi masyarakat di berbagai suku yang tersebar di daerah di Indonesia. Filantropi juga menjadi bagian dari ajaran dari berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.

Dalam masyarakat Jawa, misalnya, dikenal tradisi jimpitan, sebuah praktek kedermawanan yang dilakukan kaum perempuan dengan menyisihkan beras yang akan dimasak untuk disumbangkan bagi kegiatan sosial lingkungan atau disumbangkan kepada warga yang mendapatkan musibah. Tradisi serupa juga ditemui di masyarakat Sunda dengan nama yang berbeda, yakni Perelek. Dalam masyarakat Jawa, misalnya, dikenal tradisi jimpitan, sebuah praktek kedermawanan yang dilakukan kaum perempuan dengan menyisihkan beras yang akan dimasak untuk disumbangkan bagi kegiatan sosial lingkungan atau disumbangkan kepada warga yang mendapatkan musibah. Tradisi serupa juga ditemui di masyarakat Sunda dengan nama yang berbeda, yakni Perelek, masyarakat Bali mengenal dan mempraktikkan tradisi Ngayah, masyarakat Toraja mempraktikkan tradisi bua bungaran, dan sebagainya.

Pada tahun 1970an mulai muncul dan berkembang Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia. Kemunculan OMS-OMS ini menandai babak baru bagi perkembangan filantropi Indonesia. Organisasi-organisasi ini lahir sebagai respon atas munculnya masalah-masalah sosial baru sebagai dampak dari proses modernisasi negara Indonesia. OMS-OMS yang lahir pada saat itu menawarkan program-program dan pendekatan baru untuk menangani masalah-masalah ini. Program-program yang mereka tawarkan tidak hanya melalui pendekatan penyantunan dan pelayanan sosial, seperti yang banyak dilakukan oleh pelaku filantropi konvensional, tapi juga program-program advokasi.

Awal dasawarsa 1990an dikenal sebagai momentum perkembangan filantropi di Indonesia. Pada dasawarsa ini Indonesia mengalami krisis ekonomi yang kemudian diikuti dengan krisis politik dan berujung pada tumbangannya rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan presiden Soeharto. Pada saat yang sama bencana alam dalam bentuk gempa bumi, kebakaran hutan, tanah longsor, dan tsunami, terjadi secara beruntun di beberapa wilayah di tanah air. Perpaduan antara krisis ekonomi dan runtuhnya sebuah rejim otoriter telah memperbesar peran masyarakat sipil dan memperluas fungsi-fungsi mereka sampai wilayah isu-isu yang sensitif yang sebelumnya kurang tergarap secara optimal karena tekanan rezim orde baru. Kondisi politik dan hukum yang kondusif pasca tumbangannya rezim Orde Baru juga mendorong perkembangan organisasi-organisasi filantropi baru, seperti yayasan keluarga, yayasan perusahaan, media massa dan OMS yang mengkhhususkan pada peran sebagai

organisasi penyalur dana (grant making) atau perantara (intermediary). Kemunculan berbagai yayasan yang diinisiasi keluarga kaya, perusahaan dan aktivis LSM sejak permulaan dasawarsa 1990an menunjukkan bahwa filantropi memang mengalami masa subur.

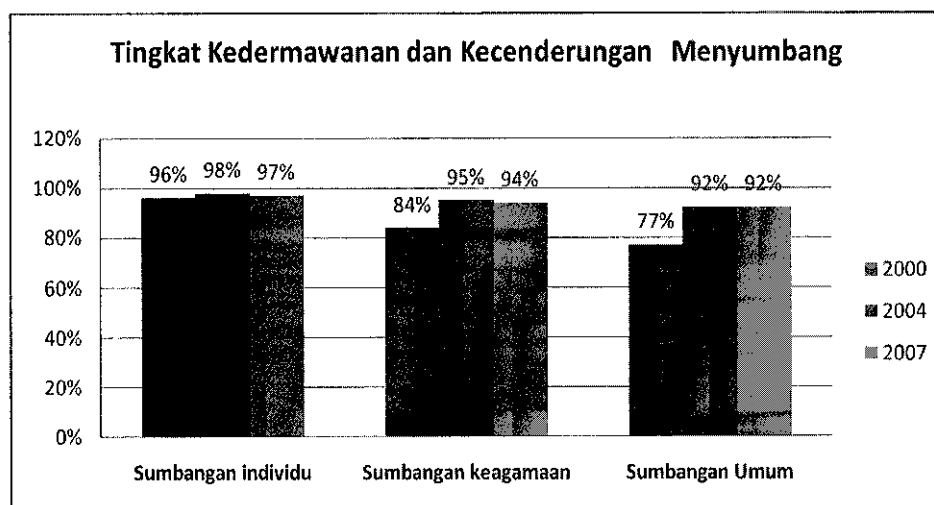
Perkembangan filantropi di era 1990-an juga ditandai dengan munculnya pemain-pemain baru yang ikut mewarnai dan mendorong pengembangan filantropi. Salah satunya adalah media massa. Media massa muncul sebagai institusi efektif dalam menggerakkan kepedulian dan kedermawanan masyarakat dan. Televisi, radio, dan surat kabar tidak lagi hanya berperan sebagai media informasi dan hiburan, tapi mulai memperluas kiprahnya sebagai penggalang dan penyalur dana sosial melalui program “dompet” dan “peduli”.

### Key Player Filantropi Indonesia

ada banyak organisasi yang berperan dan berkontribusi dalam mengembangkan filantropi di Indonesia. Masing-masing organisasi memiliki peran dan kontribusi yang berbeda. Pemilahan organisasi yang terlibat dalam kegiatan filantropi di Indonesia dalam prakteknya tidak sepenuhnya bisa dijalankan dengan baik. Banyak lembaga yang menjalankan dua fungsi yang berbeda atau tidak menjalankan peran sebagai mana konsep idealnya.

Donatur atau giving end merupakan peran yang paling sentral dan mendapatkan perhatian utama dalam berbagai diskusi dan penelitian seputar filantropi.

Donatur individu berasal dari kalangan masyarakat umum yang menyumbangkan dana, barang, keahlian atau jaringannya untuk kepentingan publik dalam rangka mengatasi persoalan sosial atau memenuhi kepentingan bersama.



Meski tingkat kedermawanannya cukup tinggi, sumbangan dari individu masyarakat ini tak banyak memberikan dampak sosial. Selain itu, penyumbang individu dikenal sebagai penyumbang yang “tertutup”. Mereka cenderung merahasiakan identitasnya atau tidak mau diketahui identitasnya pada saat menyumbang. Sementara donatur institusi berasal dari kalangan perusahaan, yayasan perusahaan, yayasan keluarga atau yayasan sosial yang memberikan sumbangan langsung kepada masyarakat maupun kepada organisasi sosial yang berperan sebagai pengelola program maupun organisasi perantara. (intermediary). Perusahaan merupakan salah satu pihak yang dalam beberapa tahun terakhir banyak menyumbangkan dana social perusahaannya sebagai salah satu bentuk dari program CSR (Corporate Social Responsibility). Peran dunia usaha dalam kegiatan Filantropi (kedermawanan sosial) di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung lama.

Organisasi perantara/ intermediary adalah organisasi yang menempatkan diri atau mengambil peran sebagai perantara, yang mengatur cara penyaluran dan pembagian sumbangan kepada organisasi yang berperan sebagai pelaksana program. Di Indonesia belum banyak organisasi yang memainkan peran ini sehingga eksistensi dan perannya penting untuk diperhatikan.

Ada beberapa organisasi yang berperan sebagai intermediary dalam kegiatan filantropi di Indonesia. Salah satunya adalah LSM yang memang didesain sebagai organisasi yang berfungsi untuk mendukung dan menyediakan sumber daya bagi OMS atau komunitas yang berperan sebagai pelaksana program. Organisasi yang berperan sebagai pelaksana umumnya berasal dari kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau yayasan sosial yang menggalang atau memperoleh sumbangan dari donatur maupun organisasi perantara untuk mendanai program-programnya. LSM mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara pesat pasca reformasi 1998. Sayangnya, perkembangan LSM yang cukup pesat ini tidak diimbangi dengan kemampuan dalam membangun keberlanjutan organisasi, khususnya dalam hal pendanaan.

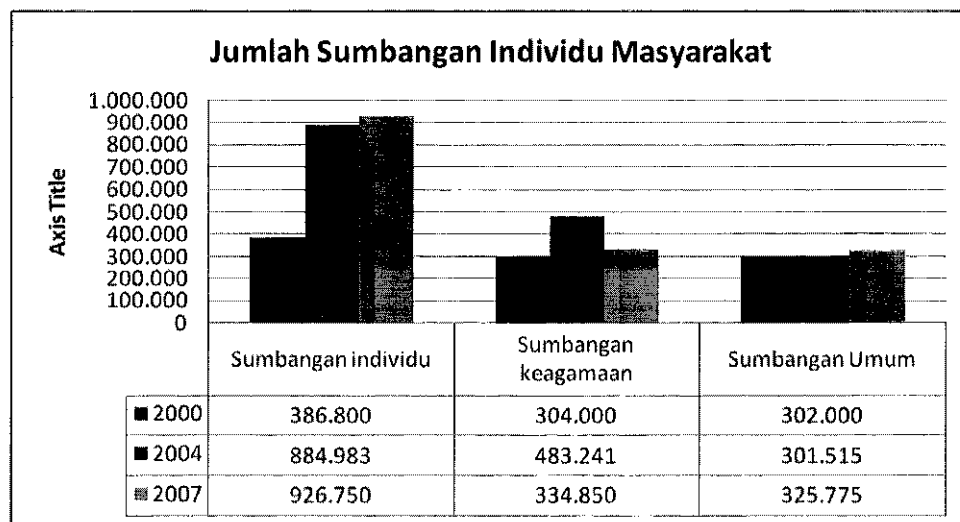
Tingginya tingkat ketergantungan LSM terhadap lembaga donor internasional menjadi isu utama dan sering diperbincangkan oleh kalangan pegiat LSM. Organisasi perantara/ intermediary adalah organisasi yang menempatkan diri atau mengambil peran sebagai perantara, yang mengatur cara penyaluran dan pembagian sumbangan kepada organisasi yang berperan sebagai pelaksana program. Di Indonesia belum banyak organisasi yang memainkan peran ini sehingga eksistensi dan perannya penting untuk diperhatikan.

Ada beberapa organisasi yang berperan sebagai intermediary dalam kegiatan filantropi di Indonesia. Salah satunya adalah LSM yang memang didesain sebagai organisasi yang berfungsi untuk mendukung dan menyediakan sumber daya bagi OMS atau komunitas yang berperan sebagai pelaksana program. Organisasi yang berperan sebagai pelaksana umumnya berasal dari kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau yayasan sosial yang menggalang atau memperoleh sumbangan dari donatur maupun organisasi perantara untuk mendanai program-programnya. LSM mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara pesat pasca reformasi 1998. Sayangnya, perkembangan LSM yang cukup pesat ini tidak diimbangi dengan kemampuan dalam membangun keberlanjutan organisasi, khususnya dalam hal pendanaan. Tingginya tingkat ketergantungan LSM terhadap lembaga donor internasional menjadi isu utama dan sering diperbincangkan oleh kalangan pegiat LSM.

Namun, ada fenomena menarik yang terjadi sejak 5 tahun terakhir: munculnya kesadaran dari sejumlah LSM untuk melakukan penggalangan dana lokal. Kesadaran itu salah satunya dipicu oleh terjadinya krisis multidimensi dan berbagai musibah serta bencana alam yang melanda negara kita sejak 1997.

### Sumber daya Filantropi

Sumber daya filantropi di Indonesia dapat berasal dari sumbangan individu, zakat, wakaf, sumbangan keluarga kaya, sumbangan perusahaan, dan social enterises.



### Pendayagunaan Sumbangan

Meski potensinya cukup besar, potensi filantropi belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan dalam membantu mengatasi persoalan sosial di Indonesia. Hal ini terkait dengan pola pendayagunaannya yang bersifat langsung (direct giving), tidak terorganisir dan berorientasi jangka pendek. Pola pendayagunaan yang relatif sama juga ditemukan dalam penyaluran dana zakat. Sebagian kaum muslimin cenderung mendayagunakan zakatnya untuk mendukung program-program yang sifatnya karitatif.

Pola pendayagunaan yang relatif sama juga ditemukan dalam penyaluran dana zakat. Sebagian kaum muslimin cenderung mendayagunakan zakatnya untuk mendukung program-program yang sifatnya karitatif. Beberapa kajian maupun pemberitaan media seputar sumbangan sosial perusahaan menunjukkan bahwa mereka masih cenderung mendukung program-program yang karitatif, emergency dan bersifat jangka pendek.

## 2. Praktek, Strategi dan Potensi Mobilisasi Sumber Daya OMS

Guru terbaik adalah pengalaman. Dan murid yang baik adalah mereka yang mau belajar dari berbagai pengalaman orang lain dan diri. Kata-kata itulah yang nampaknya cocok untuk menggambarkan fenomena berkembang pesatnya kesadaran sejumlah OMS di Indonesia untuk melakukan dan menguatkan kapasitas dan potensi keberlanjutan organisasi mereka melalui penggalangan sumberdaya lokal dari praktek filantropi yang berkembang di masyarakat. Lebih jauh, penggalangan dana OMS juga mulai merambah ranah pengembangan usaha sosial. Kesadaran itu salah satunya dipicu oleh terjadinya krisis multidimensi, bencana dan mulai banyak donor yang bergerak langsung ke lapangan tanpa melibatkan dan melalui OMS lokal. Kondisi ini memunculkan inisiatif-inisiatif baru dalam penggalangan dana sosial yang dihasilkan dari kegiatan filantropi masyarakat.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa upaya penggalangan sumber daya untuk program-program penguatan demokrasi ini mulai mendapatkan dukungan masyarakat. Upayanya memang tidak semudah menggalang dukungan untuk program karitatif. Perlu upaya yang lebih keras dan sentuhan inovasi serta kreativitas untuk menawarkan program ini kepada masyarakat maupun sektor swasta. Dana atau sumber daya yang dihasilkan juga belum sebesar sumbangan untuk program emergency, keagamaan ataupun penyantunan. Karena jumlahnya yang kecil, sumbangan yang digalang belum bisa menjamin keberlanjutan organisasi, tapi sudah bisa mendorong kemandirian pembiayaan program. Namun, kecenderungan ini bisa menjadi pertanda mulai berkembangnya filantropi untuk penguatan program demokrasi. Strategi

pengemasan dan komunikasi program memang menjadi kunci keberhasilan, selain keterlibatan tokoh yang disegani, dalam menawarkan dan mempromosikan program ini ke masyarakat.

#### Penggalangan Dana untuk Program Penguatan Demokrasi

No	Nama Program	Strategi	Pelaksana
1.	Koin Keadilan	Facebook dan posko	Komunitas KK
2.	Fundraising untuk Anti Korupsi	Debet rekening dan direct giving	ICW
3.	Pedulil Perempuan	Caused Related marketing	7 LSM perempuan
4.	Keamanan Pangan	Transfer dan direct giving	YLKI, PFI dan Dompot Dhuafa
5.	Pengawasan Korupsi di sekolah	Transfer dan direct giving	ICW dan Dompot Dhuafa
6.	Anti kekerasan terhadap perempuan	Direct giving dan sumbangan berantai	YSIK & Komnas Perempuan
7.	Dana Kesehatan aktivis HAM	Event, transfer & Direct Giving	YSIK, Komnas PP, PAH & Rahima
8.	Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin	Transfer & Direct Giving	YLBHI & Dompot Dhuafa
10.	Penguatan organisasi perempuan	Membership & Radio	Hapsari
11.	Partisipasi Politik Perempuan dan Kelompok Marjinal	Credit Union, direct giving, dan	SPPN, Swara Perempuan, Hapsari
12.	Pembangunan perdamaian, penguatan minoritas dan pluralitas, dan kebebasan beragama	Trustfund, sumbangan individu, dana keluarga, usaha	ICRP, Maarif Institute, Wahid Institute

Fenomena menarik lainnya adalah pada profil penyumbang program-program demokrasi. Hasil penelitian di beberapa OMS menunjukkan Program-program penguatan demokratisasi didukung tidak hanya oleh kalangan kelas menengah, tapi juga masyarakat bawah. Di beberapa organisasi atau yayasan keluarga, seperti Ma'arif Institute, ICRP, atau Wahid Institute, yang menjadi simbol OMS kelas menengah, para penyumbang utamanya sebagian besar adalah para tokoh, pengusaha, mantan pejabat dan kalangan kelas menengah ke atas. Namun di OMS yang berbasis rakyat, seperti Hapsari, Swara Perempuan, Alive, SPPN, dan beberapa organisasi lainnya, penyumbang utamanya adalah masyarakat bawah. Bentuk sumbangannya pun didominasi sumbangan in kind seperti bahan makanan, buah-buahan, tempat pertemuan maupun tenaga. Sementara beberapa OMS yang masuk ke pasar fundraising dana publik, seperti ICW, YSIK, Yappika, dan sebagainya, disumbang oleh masyarakat dari semua kalangan. Publik umumnya mendukung program yang berkaitan erat dengan kepentingan dan persoalan yang dihadapi masyarakat, serta manfaatnya bisa dilihat dan dirasakan secara nyata.

#### Penggalangan Sumbangan

Sumbangan atau Dana sosial masyarakat menjadi salah satu sumber daya filantropi yang bisa digalang OMS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumbangan donasi menjadi sumber dana yang digalang di hampir semua OMS. Penggalangan sumbangan diharapkan tidak menghasilkan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program, tapi sebagai upaya untuk mengenalkan isu-isu atau persoalan yang ditangani OMS.

Strategi yang ditempuh OMS dalam penggalangan sumbangan masyarakat antara lain melalui pemanfaatan tradisi kedemawanan, penggalangan dana lewat media, penggalangan dana lewat canvassing and event, penggalangan inkind, penggalangan dana abadi, penggunaa jaringan dan jejaring sosial, dan penggalangan sumbangan internal organisasi.

Sementara itu ada pula penggalangan sumber pendanaan yang berasal dari penggalangan dukungan dan kemitraan sektor swasta. Perusahaan selalu melihat OMS sebagai bagian kelompok serikat buruh, pro lingkungan dan sebagainya yang selalu mengawasi dan memberi hambatan bagi perusahaan. Dan sebaliknya, OMS selalu melihat perusahaan sebagai musuh yang tidak pernah memihak yang lemah dan tidak sejalan dengan agenda perjuangan hak-hak buruh, lingkungan dan sebagainya. Disisi luar pun berkembang pandangan bahwa hubungan yang baik antara OMS dan perusahaan adalah sebuah bentuk skandal. OMS yang melakukan kerjasama akan di cap sebagai OMS oportunistik dan menikung dalam gerakan dan sebagainya.

Pola kemitraan yang mencairkan hubungan kedua belah pihak terbangun oleh adanya model-model pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR). Program CSR biasanya dilakukan untuk mengantisipasi maupun merespon permasalahan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan atau di wilayah lain di luar perusahaan. Perusahaan secara rutin menggelontorkan sumberdaya untuk melakukan intervensi terhadap permasalahan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, kemiskinan dan sebagainya di sekitar mereka. Ada kecenderungan dalam melakukan tanggungjawab sosial, perusahaan bekerjasama dengan OMS atau menyalurkannya lewat OMS

Menciptakan pendapatan menjadi salah satu pilihan bagi OMS, khususnya bagi mereka yang bergerak dalam isu-isu sensitif yang kurang dipahami dan disumbang masyarakat. Untuk mengatasi persoalan ini, OMS menempuh strategi dengan cara "memutar". Maksudnya mereka tidak secara langsung meminta masyarakat menyumbang program atau persoalan yang dijalankan, tapi dengan membeli produk yang dibuat organisasi. Dengan membeli produk tersebut sebenarnya masyarakat menyumbang secara tidak langsung terhadap program yang dijalankan karena hasil penjualan barang itu digunakan untuk mendanai program.

## Dukungan dan Sumbangan Perusahaan untuk Program Penguatan Demokrasi

No	Nama Perusahaan	Program	Mitra
1.	The Body Shop	Advokasi UU KDRT, pemberdayaan perempuan dan trafficking	YSIK & Komnas Perempuan
2.	Unilever & Guardian	Penguatan kapasitas organisasi perempuan	Peduli Perempuan
3.	Micorosoft	Akses informasi (Internet) bagi buruh Migran	Tifa & Migran care
4.	Exxon Mobil	Penguatan pemerintahan desa dan penguatan kapasitas perempuan	Ire, YJP, Persepsi, dll
5.	Jawa Pos Group	Pengembangan Otonomi Daerah melalui penelitian, publikasi dan penganugerahan "Otonomi Awards"	Unair, ITS, Unbraw
6.	Sampoerna	Pendidikan pemilih dan kampanye pemilu damai	KPP (Komite Pemberdayaan Pemilih)
7.	Bakrie Group	Penguatan demokrasi, nasionalisme dan pasar melalui lembaga kajian Freedom Institute	Universitas & LSM
8.	Arifin Panigoro	Penguatan kapasitas parpol dan institusi demokrasi	Sekolah Demokrasi Indonesia
9.	Keluarga Eka Tjipta	- Peningkatan kapasitas menulis bagi aktivis OMS - Pendiri, donatur dan board OMS di bidang pluralisme	Universitas & LSM
10	Keluarga Sudhamek	Pendiri, donatur dan board OMS di bidang pluralisme	Universitas & LSM
11	City Group	Peningkatan kapasitas OMS dalam manajemen organisasi	Pacivis UI
12	Indofood	Pendidikan kewarganegaraan dan multikulturalisme	SET/Visi Anak Bangsa
13	Keluarga Habibie	Pengembangan Demokrasi lewat melalui lembaga Habibie Center	LSM dan Universitas

### Peran Tokoh dan Dewan Pembina

Salah satu hal yang terpenting dari sisi keberlanjutan OMS adalah komitmen pendiri dan dewan yayasan tidak hanya membangun budaya organisasi, pencitraan publik tetapi juga penggalangan sumberdaya dalam bentuk uang, barang, komitmen, sukarelawan dan sebagainya. Disini para pendiri dan dewan pendiri tidak hanya berkomitmen untuk secara rutin menggelontorkan dukungan sumberdayanya, tetapi juga membangun pengaruh dan jaringannya dari dalam dan luar negeri untuk penggalangan sumberdaya baik dari donor individual, perusahaan, internasional dan pemerintah.

### 3. Tantangan dan Permasalahan Internal dan Eksternal OMS dalam Keberlanjutan

Upaya-upaya bagi keberlanjutan institusi sudah banyak dilakukan oleh OMS. Meski demikian, tidak semua upaya tersebut bermuara pada hasil yang diimpikan. Pada tataran praktek banyak ditemukan tantangan maupun persoalan yang menjadi faktor berpengaruh pada keberlanjutan institusinya, baik internal maupun eksternal.

#### Faktor Internal

- Ketergantungan OMS terhadap hibah lembaga donor internasional juga membuat OMS dan program-programnya dianggap sebagai perpanjangan tangan dari lembaga asing yang memiliki misi atau agenda tertentu.
- Terkait keberlanjutan kelembagaan, OMS mengalami kemandekan terjadi kemandegan dalam proses transformasi pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di internal organisasi
- strategi komunikasi, baik komunikasi ke dalam maupun ke luar organisasi. Komunikasi pencitraan ini juga merupakan bagian dari upaya pemecahan persoalan publik. Kenyataannya, OMS hanya memiliki kedekatan dengan warga yang merupakan beneficiaries langsung dari program-program mereka
- Keberlanjutan kelembagaan ini akan ditopang juga oleh kepercayaan publik kepada OMS.
- OMS belum terbuka kepada peluang-peluang kemitraan dengan pihak korporasi.
- Transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati yang dipertaruhkan OMS. Namun hal ini masih terkendala di kalangan OMS sendiri.
- OMS umumnya memiliki program-program yang penting dan substantif, sayangnya OMS belum memiliki system informasi dan dokumentasi yang permanen.

- Penggalangan dana publik oleh OMS masih belum optimal. Mengingat, potensi sumbangan publik cukup besar untuk digalang.
- Komitmen dan kapasitas lembaga dalam memobilisasi sumber daya publik maupun mendiversifikasi pendanaan organisasi masih minim.

#### **Faktor Eksternal**

- Ketergantungan OMS terhadap hibah lembaga donor internasional juga membuat OMS dan program-programnya dianggap sebagai perpanjangan tangan dari lembaga asing yang memiliki misi atau agenda tertentu.
- Terkait keberlanjutan kelembagaan, OMS mengalami kemandekan terjadi kemandegan dalam proses transformasi pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di internal organisasi
- strategi komunikasi, baik komunikasi ke dalam maupun ke luar organisasi. Komunikasi pencitraan ini juga merupakan bagian dari upaya pemecahan persoalan publik. Kenyataannya, OMS hanya memiliki kedekatan dengan warga yang merupakan beneficiaries langsung dari program-program mereka
- Keberlanjutan kelembagaan ini akan ditopang juga oleh kepercayaan publik kepada OMS.
- OMS belum terbuka kepada peluang-peluang kemitraan dengan pihak korporasi.
- Transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati yang dipertaruhkan OMS. Namun hal ini masih terkendala di kalangan OMS sendiri.
- OMS umumnya memiliki program-program yang penting dan substantif, sayangnya OMS belum memiliki system informasi dan dokumentasi yang permanen.
- Penggalangan dana publik oleh OMS masih belum optimal. Mengingat, potensi sumbangan publik cukup besar untuk digalang.
- Komitmen dan kapasitas lembaga dalam memobilisasi sumber daya publik maupun mendiversifikasi pendanaan organisasi masih minim.
- Kebijakan mengenai insentif bagi organisasi filantropi dan nirlaba mengalami perbaikan, diantaranya kebijakan insentif perpajakan.
- Meski ada kemajuan, kebijakan ini menuai banyak kritikan karena bersifat parsial.
- Kondisi legal formal, politik, dan sosial sudah cukup memungkinkan bagi OMS untuk ekspansi dalam penggalangan dana bagi organisasinya.
- Belum jelasnya pembagian peran para pelaku filantropi, khususnya antara giving end/ donatur, channelling end/ intermediary dan receiving end/ implementing.
- Persepsi keliru terhadap eksistensi, peran dan fungsi OMS. Ada anggapan OMS sebagai kepanjangan tangan asing karena sebagian besar didanai oleh donor internasional.
- masyarakat sebagai penerima manfaat maupun perusahaan sebagai donatur masih terbelenggu pada realitas kedermawanan yang diterjemahkan untuk hal-hal yang sifatnya karikatif, reaktif dan kuratif.
- Menguatnya posisi dan pengaruh kelompok-kelompok anti demokrasi yang menyulitkan OMS untuk mengkampanyekan program-program yang berlawanan dengan mereka, apalagi untuk melakukan public fundraising secara terbuka
- Munculnya kompetitor baru yang kapasitas dan sumber dayanya lebih tinggi: OPZ (Organisasi Pengelola Zakat yang di dalamnya terdiri dari BAZ dan LAZ), Media, dan LSM internasional.
- Belum kondusifnya hubungan dan komunikasi antara OMS dengan perusahaan dan pemerintah yang disebabkan oleh prasangka di masing-masing entitas organisasi.

#### **4. MOBILISASI FILANTROPI UNTUK DEMOKRASI**

Sejarah mobilisasi filantropi di Indonesia menunjukkan bahwa sumberdaya filantropi yang ada digunakan oleh OMS untuk penegakan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui sumberdaya yang dimilikinya, OMS berperan aktif dan berhasil mempengaruhi kebijakan negara dalam bidang pengembangan demokrasi dan perlindungan HAM. Persoalan kemiskinan, polusi, demokrasi, jender, masalah perburuhan, hak sipil, hak politik dan pelanggaran HAM pun menjadi agenda advokasi dan pelayanan sosial OMS di Indonesia.

Dalam masa transisi demokrasi yang telah berlangsung 12 tahun terakhir ini di Indonesia. Sumberdaya filantropi dan strategi mobilisasi filantropi yang digerakan oleh OMS dan Masyarakat Sipil diatas, memberi dampak langsung terhadap demokrasi. Mobilisasi filantropi tersebut, terbukti tidak hanya berdampak signifikan bagi kesehatan dan keberlanjutan organisasi tetapi juga menguatkan prakarsa demokratis yang selama didorong OMS. Berbagai dampak pemanfaatan sumberdaya filantropi dan mobilisasi filantropi oleh OMS dan masyarakat terlihat berkontribusi besar terhadap kesehatan demokrasi di Indonesia.

#### **II. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

- Pasca reformasi 1998 gerakan filantropi mengalami perkembangan yang sangat signifikan ditandai dengan meningkatnya jumlah dana yang disumbangkan masyarakat maupun sektor swasta yang berhasil digalang oleh berbagai organisasi filantropi. Kemajuan filantropi juga ditandai dengan perluasan program-program atau kegiatan-kegiatan yang didukung masyarakat maupun sektor swasta.
- Kemajuan dan potensi dana besar yang ditawarkan oleh gerakan filantropi ini ternyata belum banyak dimanfaatkan oleh OMS (Organisasi Masyarakat Sipil), terutama yang bergerak dalam isu atau program penguatan demokrasi. OMS-OMS belum bisa memanfaatkan potensi filantropi karena minimnya komitmen dan kapasitas dalam memobilisasi dukungan dan sumber daya masyarakat.



- Tantangan terbesar OMS untuk menggalang dana publik adalah kepercayaan yang masih rendah. Masih rendahnya penanaman trust dan pencitraan publik OMS di masyarakat yang disebabkan juga oleh tidak adanya manajemen sistem informasi dan dokumentasi yang baik.
- Sinergi dan kemitraan antara OMS dengan sektor swasta dan lembaga filantropi (yayasan keluarga, OPZ dan media) membuat upaya penggalangan dana dan pelaksanaan program lebih efektif dan efisien.
- Pemahaman dan persepsi-persepsi yang keliru terhadap eksistensi dan peran OMS juga membuat lembaga ini terhambat dalam menggalang dukungan dan sumber daya.
- Munculnya stigma negatif dan stereotipe di kalangan publik dan aktivis OMS berkenaan dengan penggalangan filantropi dari perusahaan: Oportunis, terkooptasi, LSM plat merah, dll.
- Menguatnya posisi dan pengaruh kelompok-kelompok anti demokrasi yang menyulitkan OMS untuk mengkampanyekan program-program yang berlawanan dengan mereka.
- Minimnya insentif dan apresiasi dari pemerintah pusat maupun daerah terhadap upaya demokratisasi yang dilakukan oleh OMS.
- Kerentanan OMS dalam keberlanjutan pendanaan berdampak pada keberlangsungan program-program penguatan demokrasi yang dijalkannya.
- Mulai munculnya kesadaran dan inisiatif-inisiatif OMS untuk mendiversifikasi ke arah bisnis.
- Program-program demokrasi yang dilakukan OMS akan didukung bila bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat.
- OMS yang dikaji memiliki rencana strategis organisasi, namun tidak ditopang dengan renstra keuangan yang memperhitungkan sumber daya yang diperlukan, serta upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mendapatkannya.

Beberapa rekomendasi dapat diajukan baik untuk kondisi organisasi masyarakat sipil (OMS), masyarakat, pemerintah, dan swasta :

#### **OMS**

- Mulai munculnya kesadaran dan inisiatif-inisiatif OMS untuk mendiversifikasi ke arah bisnis.
- Program-program demokrasi yang dilakukan OMS akan didukung bila bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat.
- OMS yang dikaji memiliki rencana strategis organisasi, namun tidak ditopang dengan renstra keuangan yang memperhitungkan sumber daya yang diperlukan, serta upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mendapatkannya.
- Perlu upaya untuk mendorong dan membantu OMS mempromosikan program-program penguatan demokrasi agar program ini bisa dikenal dan disumbang masyarakat.
- Mendorong OMS-OMS untuk berlaku transparan dan akuntabilitas yang menjadi pertaruhannya di mata publik sekaligus salah satu cara untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yang lebih luas.
- OMS perlu didukung dan didorong untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memperkuat citra diri, serta mengemas dan mempromosikan program-program penguatan demokrasi agar dapat didukung masyarakat.
- Meningkatkan proses-proses transfer of knowledge secara simultan kepada tim internal di lembaga atau upaya-upaya 'kaderisasi' sebagai langkah konkrit menjaga keberlanjutan lembaga.
- Mulai membiasakan untuk mendukung lembaga atau menyumbang melalui organisasi yang dipercaya untuk dapat mengelola dan menyalurkannya berdasarkan program kerja yang strategis.

#### **Masyarakat**

- Perlu upaya untuk mendidik masyarakat untuk menyumbang program-program non karitatif, diantaranya program-program penguatan demokrasi.
- Mulai menjadi pengawas yang kritis terhadap proses-proses demokrasi yang berlangsung baik di pentas politik pemerintahan pusat dan daerah, dan para pengelola sumber daya masyarakat.

#### **Pemerintah**

- Perlu enabling environment dalam bentuk kebijakan yang mempermudah dan mengapresiasi inisiatif dan upaya memobilisasi dukungan filantropi untuk penguatan demokrasi.
- Pemerintah juga diharapkan mempermudah OMS untuk tetap kritis dan memberikan peran yang lebih luas dan leluasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme.
- Kepastian hukum dan perlindungan negara dibutuhkan oleh lembaga-lembaga yang bergerak di isu sensitif.

#### **Swasta**

- Perlu membuka hubungan yang setara dengan OMS terutama untuk pendayagunaan sumber daya yang lebih bernilai strategis dan berdampak luas dibandingkan bantuan-bantuan yang sifatnya karitatif dan jangka pendek.
- Membuka diri untuk melakukan sinergi dan kerjasama yang fair dengan mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat secara lebih luas dan terorganisir.
- Swasta sebaiknya tidak semata-mata mengedepankan keuntungan sesaat sebagai output dari kegiatan usahanya, tapi bersama-sama OMS juga terlibat dalam upaya mengatasi persoalan sosial masyarakat sebagai investasi sosial yang berjangka panjang.